

**ANALISIS PENGARUH POLITICAL CONNECTION DAN STRUKTUR
KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA TAHUN 2014-2015)**

(Skripsi)

Oleh

DESY PERMATASARI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH POLITICAL CONNECTION DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014-2015)

Oleh

Desy Permatasari

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah politik. Politik suatu Negara berkaitan dengan kebijakan publik termasuk kebijakan untuk bisnis. Oleh karena itu antara politik dan bisnis saling berkaitan yang muncul istilah perusahaan terkoneksi politik. Selain politik, kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *political connection* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan publik. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan leverage.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN dan perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut didapatkan sampel sebanyak 112 perusahaan. Data yang menggunakan adalah laporan tahunan perusahaan BUMN dan perusahaan sektor properti selama dua tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2015.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki nilai ROA yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini ditunjukkan dari nilai ROA tertinggi pada perusahaan *Modernland Realty Tbk* yang merupakan perusahaan tanpa koneksi politik. Terlihat dari nilai probabilitas *political connection* sebesar 0,041 dengan arah koefisien regresi negatif yang berarti semakin naik nilai *political connection* maka semakin menurun kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan baik kepemilikan institusional maupun kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hal ini ditunjukkan pada nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,360 dan nilai probabilitas kepemilikan publik sebesar 0,327.

Kata kunci : *Political Connection*, Struktur Kepemilikan dan Kinerja Perusahaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF POLITICAL CONNECTION AND OWNERSHIP STRUCTURE ON CORPORATE PERFORMANCE (EMPIRICAL STUDY OF LISTED COMPANIES IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN YEAR 2014-2015)

By

Desy Permatasari

One of the environmental factors that affect the performance of the company is political. The politics of a Country with regard to public policy, including policy for the business. Therefore between politics and business are interrelated the term of the company connected to the political. In addition to political, the company's performance is also influenced by the ownership structure. This study aims to analyze the influence of political connection and ownership structure on the performance of the company. The ownership structure is divided into two, namely institutional ownership and public ownership. This study uses two control variables namely company size and leverage.

The population of this study is the state-owned companies and companies in the property sector that listed in Bursa efek Indonesia (BEI). Sampling using purposive sampling method. Based on these methods obtain a sample of 112 companies. Data use is the annual report of the state-owned companies and companies in the property sector for two years from 2014 to 2015.

The results of this study show that the companies connected to the political has a value of ROA is lower than the company who are not connected to politics. This is indicated from the value of ROA is the highest in the company Modernland Realty Tbk is a company without political connections. Seen from the value of the probability of political connection of 0,041 with the direction of the regression coefficient is negative, which means the rising value of political connection then it decreases the performance of the company.

The ownership structure of both institutional ownership and public ownership does not affect the performance of the company it is shown in the value of the probability of institutional ownership amounted to 0,360 and the value of the probability of public ownership of 0,327.

Keywords : Political Connection, Ownership Structure and Company Performance

**ANALISIS PENGARUH POLITICAL CONNECTION DAN STRUKTUR
KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA TAHUN 2014-2015)**

Oleh

DESY PERMATASARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *POLITICAL CONNECTION* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014-2015)**

Nama Mahasiswa : **Desy Permatasari**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1111031125

Program Studi : S1 Akuntansi

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

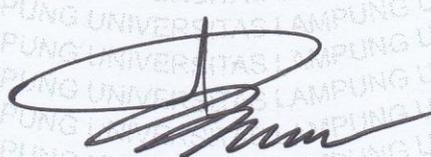


Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700801 199512 2 001



Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP 19740826 200812 2 002

2. Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

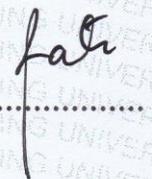
Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.



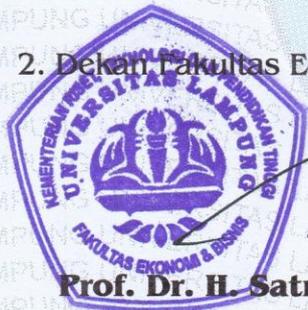
Sekretaris : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Maret 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 April 1993. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Orang tua penulis, Ayah bernama H. Herman

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 Rawas Laut (Teladan) Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2008

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011

5. D3 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, lulus pada tahun 2014

Selanjutnya tahun 2014 penulis diterima di perguruan tinggi negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program S1 Akuntansi melalui non-SNMPN

Bandar Lampung, 07 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Desy Permatasari

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 April 1993. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Orang tua penulis, Ayah bernama Hi. Herman Suwondo dan Ibu bernama Hj. Sri Heryani, S.Pd.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut.

1. Taman Kanak-kanak (TK) Kartini II Bandar Lampung, lulus pada tahun 1999;
2. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 09 Bandar Lampung lulus pada tahun 2008;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 04 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011;
5. D3 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, lulus pada tahun 2014;

Selanjutnya tahun 2014 penulis diterima di perguruan tinggi negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program S1 Akuntansi melalui non-SNMPTN.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, teriring doa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis mempersembahkan laporan akhir ini sebagai tanda cinta tulus kepada

1. Orang tua

Papa dan mama yang senantiasa memberi tanpa mengharap balasan, selalu mendoakan anaknya tanpa henti, mendidik dengan tegas dan penuh kasih sayang.

2. Keluarga

Keluarga yang selalu menjadi motivator untuk diriku agar selalu terus maju dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, khususnya untuk kakak-kakakku. Terima kasih atas doa dan motivasi.

3. Teman-teman Seperjuangan

Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman S1 Akuntansi Konversi 2011 yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian laporan akhir ini.

4. Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTO

“ Qaala innaka minal munzhariin”

Allah berfirman, “Sesungguhnya engkau termasuk mereka yang
tangguh”

(QS. Al-A'raaf: 15)

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur hanya layak disampaikan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terkait penyelesaian laporan akhir ini.

Skripsi berjudul “Analisis Pengaruh *Political Connection* Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2015” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H Satria Bangsawan, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt selaku Ketua Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Jurusan S1 Akuntansi;
4. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam perkuliahan;

5. Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Pertama yang secara tulus membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran serta nasihat dalam penulisan skripsi ini;
6. Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembahas skripsi;
7. Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak, Akt selaku Dosen Pembimbing Kedua yang secara tulus membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran serta nasihat dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan Program Studi S1 Akuntansi, atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Papa dan Mama tercinta, Hi. Herman Suwondo dan Hj. Sri Heryani, S.Pd yang senantiasa memberi tanpa mengharap balasan, berdoa tanpa henti, mendidik dengan tegas, sepuh hati dan kasih sayang;
10. Kakak-kakaku Benny Hermawan, S.S dan Dewi Puspitasari, S.Sos yang selalu memberi semangat dan motivasi serta menjadi tempat berkeluh kesah;
11. Teman-teman seperjuangan saat penulis melaksanakan perkuliahan khususnya anak S1 Akuntansi 2011 Konversi. Yang saling memotivasi, saling membantu, saling peduli serta menciptakan kebersamaan yang bahagia;
12. Sahabat setiaku "TJABE" Ade, Apria, Kak Aswan, Bayu, Deni, Erlin, Kak Febri, Herma, Hesti, Osi, Syahid, Septian yang selalu memberikan

semangat, dukungan, membantu dan tempat berkeluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi ini;

13. Sahabatku “CUYS” Anike, Annisa, Ayulita, Dewi, Erwinda yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
14. Sahabatku sekaligus adik tingkat konversi 2012, Anisa, Disty, Febmi, Fika, dan lainnya yang selalu membantu dan setia menemani saat penulis melakukan bimbingan skripsi ini;
15. Rekan-rekan kerja PT. Lintas Prima Energi Cabang Provinsi Lampung yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.

Semoga bantuan, dukungan serta semangat yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi.

Penulis, Maret 2017

Desy Permatasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
SANWACANA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Definisi Konseptual.....	13
2.1.1 Teori Berbasis Sumber Daya	13
2.1.2 Teori Harapan	15
2.1.3 Teori Keagenan	18
2.1.4 Kinerja Perusahaan	20
2.1.5 Struktur kepemilikan.....	23
2.1.6 <i>Political Connection</i>	27

2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31
2.4 Rumusan Hipotesis	32
2.4.1 Pengaruh <i>Political Connection</i>	32
2.4.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan.....	34

BAB III METODE PENULISAN

3.1 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.1.1 <i>Political Connection</i>	37
3.1.2 Kepemilikan Institusional	39
3.1.3 Kepemilikan Publik.....	40
3.1.4 Kinerja Perusahaan.....	40
3.1.5 Variabel Kontrol.....	40
3.2 Populasi dan Sampel	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	43
3.4 Analisis Metode	43
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	43
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	44
3.4.3 Uji Hipotesis.....	48

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	52
4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	54
4.3.1 Uji Normalitas	54
4.3.2 Uji Multikolinearitas	56
4.3.3 Uji Autokolerasi	57
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	58
4.4 Uji Hipotesis.....	59
4.4.1 Analisis Regresi Berganda	59
4.3.2 Uji Koefisien Determinasi.....	61
4.3.3 Uji Kelayakan Model	62
4.5 Pembahasan	63

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	67
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Autokorelasi.....	47
2. Pemilihan Sampel.....	51
3. Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4. Distribusi Frekuensi <i>Political Connection</i>	54
5. One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	56
6. Uji Multikolinearitas.....	57
7. Uji Autokorelasi	57
8. Analisis Statistik Deskriptif	60
9. Uji Koefisien Determinasi.....	61
10. Uji Kelayakan Model.....	62
11. Hasil Penelitian.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Regresi Linier

Lampiran 2 : Perusahaan *Go Public*

Lampiran 3 : Tabulasi Data

Lampiran 4 : Alat Uji Data Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Dalam Perusahaan
Terkoneksi Politik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat Keberhasilan sebuah perusahaan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan di mana perusahaan tersebut didirikan. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan ialah politik. Pengaruh politik suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan begitu penting untuk memahami hubungan antara politisi dengan perusahaan serta pengaruhnya terhadap efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Adapun tujuan dari politik adalah untuk merumuskan kebijakan publik termasuk untuk kepentingan dunia bisnis. Sebaliknya, dunia bisnis dapat menunjang politik suatu negara.

Berkaitan dengan politik menyangkut partai politik, maka hubungan bisnis dan politik, salah satunya adalah membiayai aktivitasnya, partai politik memerlukan sumber-sumber pendanaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang mengatur sumber keuangan dan batas maksimum sumbangan untuk partai politik. Sumber keuangan partai politik meliputi iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN/APBD. Batas maksimum sumbangan untuk perseorangan yaitu Rp 1 miliar per orang dalam satu tahun anggaran dan batas maksimum sumbangan untuk perusahaan dan/atau badan usaha yaitu Rp 7,5 miliar per perusahaan dan/atau badan usaha dalam satu tahun anggaran. Dalam perspektif yang ideal, partai yang

baik adalah partai yang didanai sendiri oleh anggota dan simpatisannya. Namun yang terjadi di Indonesia tidaklah demikian. Di Indonesia, pada dasarnya partai politik lebih banyak bergantung pada bantuan pemerintah dan bantuan korporasi, jika dibandingkan pada iuran anggotanya sendiri. Vermonte (2012) juga menjelaskan bahwa perubahan subsidi oleh negara kepada partai politik dari subsidi langsung menjadi subsidi tidak langsung memberi ruang lebih terbuka bagi praktek-praktek korupsi. Dampak buruk lain ialah semakin bergantungnya partai-partai politik pada bantuan pihak ketiga, baik korporasi maupun individu yang memiliki modal besar. Akhirnya, partai-partai politik mencari calon-calon anggota legislatif atau pemerintah daerah dari mereka yang memiliki modal besar walaupun tidak memiliki kaitan apapun dengan partainya. Etika balas budi yang masih kental di Indonesia memberikan pandangan bahwa sumbangan yang diberikan perusahaan pada partai politik tidak secara gratis. Perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan mengharapkan adanya timbal balik atau manfaat yang diperoleh dari sumbangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bisnis dan politik merupakan dua hal yang saling terkoneksi.

Suatu perusahaan dikatakan terkoneksi politik juga apabila setidaknya satu dari pemegang saham terbesar perusahaan (yaitu siapa pun baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan 10% suara) atau jajaran direksi (CEO) adalah seorang anggota parlemen, seorang menteri, seorang pejabat militer, atau seorang kepala negara. Suatu perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan beberapa manfaat antara lain kemudahan akses untuk memperoleh pinjaman dari bank, penerimaan tender-tender dari pemerintah, atau dalam bentuk kebijakan dan peraturan yang memudahkan bisnis.

Menurut teori berbasis sumber daya perusahaan, nilai koneksi politik terutama didorong oleh hubungan dengan pemerintah, yang membantu perusahaan untuk mendapatkan sumber daya kunci dan dengan demikian meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan swasta yang beroperasi di lingkungan kelembagaan yang lemah namun dengan memiliki manajemen yang terhubung secara politik membantu mereka untuk mengatasi pasar dan hambatan kelembagaan dan mencari manfaat yang menguntungkan dari pemerintah.

Adapun teori harapan, dapat dipahami bahwa harapan merupakan sesuatu yang dapat dibentuk dan dapat digunakan sebagai langkah untuk perubahan yang menguntungkan atau merugikan untuk setiap individu dengan langkah masing-masing. Perubahan yang berkaitan dengan harapan tersebut membutuhkan pembentukan dan pemeliharaan kekuatan pribadi dalam konteks hubungan yang saling membantu. Para pengusaha mengharapkan rumusan kebijakan pemerintah yang dapat memudahkan bisnis mereka. Sedangkan partai politik membutuhkan sumbangan dana untuk aktivitas partai. Pengusaha yang memiliki modal besar memberikan bantuan dana kepada partai politik. Sebagai imbalan atas bantuan tersebut, partai politik melalui anggotanya yang berada di jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Kementerian merumuskan kebijakan atau peraturan yang dapat memudahkan bisnis dari perusahaan yang telah berkontribusi pada pendanaan partai. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan mengharapkan adanya timbal balik atau manfaat yang diperoleh dari sumbangan tersebut.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen terhubung secara politik mungkin terkait dengan beban kebijakan di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai pemilik utama, pemerintah memiliki kekuasaan untuk campur tangan dalam operasi BUMN, dan memiliki insentif untuk melakukannya dalam bentuk mengejar tujuan-tujuan politik dan sosial, seperti mengurangi pengangguran. Pemerintah biasanya menunjuk manajemen yang memiliki koneksi politik yang akan memprioritaskan keselarasan tujuan perusahaan dengan tujuan pemerintah daripada memaksimalkan nilai perusahaan. Koneksi politik manajemen di perusahaan swasta umumnya memainkan peran berbeda dengan manajemen di BUMN. Di perusahaan swasta, manajemen ini membantu perusahaan untuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan dari pemerintah, sedangkan di BUMN, mereka menerima sedikit bantuan dari pemerintah melainkan memikul beban melaksanakan kebijakan pemerintah. Dalam persektif teori keagenan, sering terjadi konflik antara *principal* dengan agen.

Pada perusahaan milik negara, pemerintah bisa disebut sebagai *principal* sedangkan manajemen disebut sebagai agen. Untuk mengatasi masalah konflik tersebut biasanya pihak pemerintah menempatkan dewan komisaris yang terdiri dari presiden komisaris, komisaris independen dan anggota, untuk mengawasi jalannya kegiatan bisnis perusahaan. Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris. Secara langsung, keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang

saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Fenomena koneksi politik di Indonesia terjadi sejak rezim Soeharto, menurut Fisman (2001), bahwa bisnis dan koneksi politik bukanlah hal yang baru. Hal ini dapat dilihat dari rekam jejak mengenai hubungan antara perusahaan dan politisi yang kuat mulai pada era Presiden Soeharto, dan masih terus berlanjut setelah reformasi. Lebih lanjut, koneksi politik tampak jelas pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun relawan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengangkatan komisaris BUMN ini, banyak menuai pro kontra, karena dilatar belakangi oleh politik bagi kekuasaan. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan birokrat dalam mengawasi perusahaan, karena penunjukkan ini dikhawatirkan akan mengejar tujuan sosial atau keuntungan pribadi atas biaya perusahaan, yang berakibat akan mengurangi nilai perusahaan.

Adanya hubungan pejabat BUMN dengan penguasa menjadikan BUMN menjadi sasaran empuk untuk menjadi sapi perah. Perusahaan pelat merah itu dijadikan tambang uang ilegal. Kecenderungan tersebut tidak hanya membuat BUMN sulit berkembang secara bisnis, tetapi juga turut melestarikan praktik korupsi. Hal ini tentunya dapat merugikan perekonomian, karena BUMN merupakan salah satu unsur penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi langsung dari produk dan layanan mereka untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan berkontribusi langsung dari realisasi fungsi sosial mereka untuk kemakmuran di Indonesia, (*sumber : bisniskeuangan.kompas.com, 2015*).

Sebagai contoh adalah koneksi politik antara Grup Permai dengan M. Nazaruddin, seorang Bendahara Umum Partai Demokrat tahun 2010 dan mantan anggota DPR RI. Beberapa proyek pemerintah yang dimenangkan oleh perusahaan Grup Permai antara lain proyek Pembangunan Fasilitas Teknologi Vaksin Flu Burung senilai Rp 718,8 miliar dari Kementerian Kesehatan dimenangkan oleh PT Anugrah Nusantara, proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar-Mengajar Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah sakit Rujukan senilai Rp 492 miliar dari Kementerian Pendidikan dimenangkan oleh PT Mahkota Negara, proyek Pengadaan 13 Pesawat Latih dan 2 Simulator Sayap untuk STPI Curug senilai Rp 114,59 miliar dimenangkan oleh PT Anugrah Nusantara, dan beberapa proyek lagi dari Kementerian yang lain, (*sumber : Koran Tempo, 2012*).

Contoh lain adalah kasus hambalang merupakan paling aktual dan faktual soal dugaan korupsi yang melibatkan penguasa, pengusaha, dan pimpinan partai yang berkuasa. Penguasa pemilik proyek bermain mata dengan politisi yang mempunyai otoritas anggaran di DPR, dan pengusaha rela merogoh kocek dalam-dalam untuk memuluskan proyek. Kasus Hambalang yang telah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki nilai total proyek Hambalang mencapai Rp 2,5 triliun. Fenomena adanya campur tangan politik saat ini tidak hanya diperusahaan milik negara, akan tetapi telah menular ke perusahaan swasta, dengan banyaknya pemilik perusahaan swasta yang terjun ke politik. Misalnya, pemilik LION AIR yaitu, Rusdi Kirana yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, (*sumber : id.m.wikipedia.org, 2014*).

Selain politik, pengaruh kepemilikan dan pengawasan didalam suatu perusahaan menjadi bahasan yang menarik. Dalam penelitian Yonneddy (2009), dewasa ini literatur keuangan berfokus pada dua isu penting, yaitu mekanisme kepemilikan dan kontrol. Dengan adanya isu tersebut mendorong perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* yang diyakini memiliki dampak positif pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, hubungan antara struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan telah menjadi isu yang menarik bagi kalangan akademisi, investor dan pembuat kebijakan, karena dengan mekanisme *good corporate governance* sebagai alternatif dengan kepemilikan pemerintah berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Hasil penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, faktor intern, faktor ekstern, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham oleh institusi mendorong pemilik untuk melakukan peminjaman kepada manajemen sehingga manajemen terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian, hasil penelitian Sabrinna (2010) menunjukkan bahwa pada struktur kepemilikan, tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan masih sedikit. Beberapa penelitian mengenai koneksi politik yang

telah dilakukan di Indonesia antara lain oleh Purwoto (2011) yang meneliti pengaruh koneksi politik, kepemilikan pemerintah, dan ketidakjelasan laporan keuangan terhadap kesinkronan dan risiko *crash* harga saham. Wijantini (2007) meneliti hubungan antara koneksi politik dan biaya tidak langsung dari *financial distress*. Wulandari (2012) menganalisis pengaruh koneksi politik dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Wirawan (2014) meneliti dominasi dari kepemilikan keluarga, hubungan politik berpengaruh pada penerapan dan praktik tata kelola perusahaan serta pemilihan anggota direksi dan komisaris di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tri Wulandari (2012). Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009, 2010, dan 2011. Jumlah perusahaan sampel adalah 57 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *political connection* memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,047 dengan arah koefisien regresi bertanda negatif. Struktur kepemilikan baik kepemilikan institusional maupun kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,279 dan nilai probabilitas kepemilikan publik sebesar 0,112. Sedangkan penelitian ini berfokus pada objek yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efek terbentuknya afiliasi antara perusahaan dengan politik melalui dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham dalam mempengaruhi kinerja perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Bisnis dan koneksi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Politik bertujuan untuk merumuskan kebijakan publik suatu negara meliputi juga kebijakan bagi perusahaan yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan sebagian bergantung pada politik negara di mana perusahaan tersebut didirikan. Selain itu, koneksi politik bagaikan pedang bermata dua. Hal tersebut dapat meningkatkan atau justru membahayakan nilai perusahaan. Timbulnya hubungan timbal balik antara partai politik dengan perusahaan bermula dari pendanaan yang dibutuhkan partai politik yang disokong dari dunia usaha. Suatu perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila setidaknya satu dari pemegang saham perusahaan atau jajaran direksi adalah seorang anggota parlemen, seorang menteri, seorang pejabat militer, seorang kepala negara, atau seorang yang berasal dari partai politik ataupun relawan kampanye partai.

Di tinjau dari segi teori dan bukti empiris, masih minimnya literatur yang membahas mengenai dampak koneksi politik diukur dari jenis kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Orden dan Garmendia (2005) meneliti hubungan antara struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan pada perusahaan Spanyol dengan hasil bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan pemerintah dan publik menunjukkan dampak negatif terhadap kinerja. Hal yang berbeda dengan penelitian Ding, dkk (2014) menyebutkan pengaruh politik dari aspek kepemilikan pemerintah maupun kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh politik dari aspek kepemilikan pemerintah menyediakan platform yang sangat diperlukan bagi

para eksekutif yang terhubung secara politik untuk menerima manfaat yang menguntungkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah.

Selain itu dari aspek kepemilikan publik, ketika kepemilikan saham oleh manajerial dan institusional tidak mampu lagi menjadi monitor bagi tindakan manajemen maka perusahaan perlu membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat (publik) untuk ikut serta dalam penyertaan saham. Penyertaan saham oleh masyarakat atau publik merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Keterlibatan masyarakat dalam struktur kepemilikan saham mendorong manajemen perusahaan untuk dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan sebelumnya. Setiawan (2006) menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan yang dilihat dari proporsi kepemilikan publik mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan dengan kinerja perusahaan. Penelitian yang lain dilakukan oleh Purba (2004), meneliti pengaruh proporsi saham publik terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan saham publik dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Hal tersebut memberikan sinyal yang baik bagi masa depan pasar modal di Indonesia sebab jika presentase saham publik di perusahaan yang *go public* dapat ditingkatkan, maka kinerja perusahaan di Indonesia yang *go public* semakin baik. Lebih lanjut, Purba (2004) menyatakan esensi dari pengujian yang

dilakukan menekankan bahwa kinerja perusahaan semakin baik apabila proporsi saham milik publik dapat ditingkatkan. Kebijakan perusahaan untuk meningkatkan proporsi kepemilikan saham publik dapat memberikan dampak pada peningkatan kinerja perusahaan sebab bertambahnya proporsi saham milik publik mendorong manajemen mengelola perusahaan dengan baik.

Dengan demikian, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh *politik connection* dan aspek struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam apakah perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja yang lebih baik atau lebih rendah dan apakah struktur kepemilikan dari perusahaan tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kinerja. Dari uraian tersebut, penelitian ini dapat dirumuskan “apakah *political connection* dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menguji apakah *political connection* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk menguji apakah aspek kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk menguji apakah aspek kepemilikan publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini terhadap beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Dengan dana yang dimiliki, apakah nantinya investor cenderung melakukan investasi pada perusahaan yang terkoneksi politik atau tidak.

2. Bagi Perusahaan

Meningkatkan kesadaran dan memotivasi perusahaan dalam hal ini manajemen dalam hal menyusun laporan keuangannya untuk tidak mengurangi pengungkapan penuh atas informasi yang seharusnya disampaikan kepada pengguna laporan keuangan.

3. Bagi Pengembangan Teori

Meningkatkan kemampuan meneliti dan menambah wawasan dalam bidang akuntansi khususnya dalam menilai kualitas dari hasil proses akuntansi yaitu laporan keuangan yang ada hubungannya dengan hubungan politik oleh pemilik.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab 1 Pendahuluan

Bab satu dari penelitian ini mengangkat latar belakang penulis mengambil tema ini, rumusan masalah yang dibahas, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan, ruang lingkup. Selain itu, dijelaskan mengenai sistematika penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Bab kedua dalam penelitian ini akan mengangkat tinjauan literatur yang didapatkan dari berbagai sumber mengenai topik-topik yang terkait dengan tema penelitian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai pengembangan hipotesis.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ketiga, dijelaskan mengenai data, variabel, serta model penelitian yang dilakukan. Dijelaskan pula mengenai metode pengujian yang dilakukan untuk penelitian ini.

Bab 4 Analisis Hasil Penelitian

Bab keempat dalam penelitian ini akan memaparkan proses serta hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Akan dijelaskan mengenai pengujian yang dilakukan serta analisa atas hasil pengujian tersebut.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Dalam bab terakhir ini akan disimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang membaca penelitian ini, atau yang bermaksud mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Berbasis Sumber Daya

Teori berbasis sumber daya perusahaan dapat digunakan untuk menjelaskan efek positif dari koneksi politik. Menurut teori ini, keunggulan kompetitif suatu perusahaan berdasarkan kepemilikan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang sulit atau mahal bagi perusahaan lain untuk mendapatkan. Studi sebelumnya, Adhikari, dkk (2006) telah mendokumentasikan bahwa manajemen terhubung secara politik dapat membantu perusahaan mereka mendapatkan sumber daya kunci pemerintah dan dukungan. Oleh karena itu, dampak positif dari koneksi politik terutama didorong oleh keuntungan memperoleh sumber kunci dari pemerintah.

Perusahaan dikendalikan oleh non-pemerintah menempatkan mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan BUMN, terutama di negara-negara berkembang, dengan kurangnya perlindungan hak milik dan lembaga pendukung pasar yang dibutuhkan oleh perusahaan swasta. Namun, mempekerjakan eksekutif terhubung secara politik adalah cara yang layak dan efektif untuk perusahaan-perusahaan swasta untuk mengatasi pasar dan mengurangi kerugian serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan BUMN dengan kepemilikan pemerintah memiliki hubungan langsung dengan pemerintah, dan

dengan demikian memiliki status yang istimewa dalam memperoleh pinjaman bank dan sumber kunci lainnya. Selain itu, *link* kepemilikan pemerintah lebih eksplisit dan stabil dari *link* pribadi eksekutif yang terhubung secara politik. Oleh karena itu, perlu untuk BUMN memiliki eksekutif yang terhubung politik untuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan dari pemerintah. Dengan kata lain, kepemilikan pemerintah mencairkan efek dari hubungan politik pihak eksekutif yang meringankan pengaruh positif dari adanya hubungan politik tersebut terhadap nilai perusahaan dan kinerja.

2.1.2 Teori Harapan

Harapan merupakan keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Snyder (2000) menyatakan bahwa harapan sebagai sekumpulan kognitif yang didasarkan pada hubungan timbal-balik antara *agency* dan *pathway*.

Berdasarkan teori harapan, dapat dipahami bahwa harapan ialah sesuatu yang dapat dibentuk dan dapat digunakan sebagai langkah untuk perubahan yang menguntungkan atau merugikan untuk setiap individu dengan langkah masing-masing. Perubahan yang berkaitan dengan harapan tersebut membutuhkan pembentukan dan pemeliharaan kekuatan pribadi dalam konteks hubungan yang saling membantu. Pada situasi adanya usaha untuk mencapai tujuan, perilaku *hopeful* akan ditentukan oleh interaksi dari hal berikut:

- a. Seberapa bernilainya tujuan atau hasil yang ingin dicapai.

- b. Pemikiran mengenai jalur untuk mencapai tujuan dan harapan yang berkaitan dengan seberapa efektif jalur/cara ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Pemikiran mengenai pribadi dan seberapa efektif individu dalam mengikuti jalur mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi harapan di atas, harapan terdiri dari komponen *willpower* dan *waypower* untuk mencapai tujuan (*goals*). Kedua komponen tersebut bersifat timbal balik, saling melengkapi dan berkorelasi positif. Menurut teori harapan dari Snyder tersebut harapan merefleksikan persepsi individu terhadap kemampuan untuk mendefinisikan tujuan dengan jelas, berinisiatif dan mempertahankan *willpower thinking* dan *waypower thinking*. Menurut Snyder (2000) komponen-komponen yang terkandung dalam teori harapan yaitu:

- a. ***Goal***

Perilaku manusia adalah berorientasi dan memiliki arah tujuan. *Goal* adalah sasaran dari tahapan tindakan mental yang menghasilkan komponen kognitif. Tujuan menyediakan titik akhir dari tahapan perilaku mental individu. Tujuan harus cukup bernilai agar dapat mencapai pemikiran sadar. Tujuan dapat berupa tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang, namun tujuan harus cukup bernilai untuk mengaktifkan pemikiran yang disadari. Dengan kata lain, tujuan harus memiliki kemungkinan untuk dicapai tetapi juga mengandung beberapa ketidakpastian. Pada suatu akhir dari kontinum kepastian, kepastian yang absolut adalah tujuan dengan tingkat kemungkinan pencapaian 100%, tujuan seperti ini tidak memerlukan harapan. Harapan berkembang dengan

baik pada kondisi tujuan yang memiliki tingkat kemungkinan pencapaian sedang.

b. *Pathway Thinking*

Untuk dapat mencapai tujuan maka individu harus memandang dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan. Proses ini yang dinamakan *pathway thinking*, yang menandakan kemampuan seseorang untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Pathway thinking* ditandai dengan pernyataan pesan internal seperti “Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya!”. *Pathway thinking* mencakup pemikiran mengenai kemampuan untuk menghasilkan satu atau lebih cara yang berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa jalur yang dihasilkan akan berguna ketika individu menghadapi hambatan, dan orang yang memiliki harapan yang tinggi merasa dirinya mampu menemukan beberapa jalur alternatif dan umumnya mereka sangat efektif dalam menghasilkan jalur alternative.

c. *Agency Thinking*

Komponen motivasional pada teori harapan adalah *agency*, yaitu kapasitas untuk menggunakan suatu jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Agency* mencerminkan persepsi individu bahwa dia mampu mencapai tujuannya melalui jalur-jalur yang dipikirkannya, *agency* juga dapat mencerminkan penilaian individu mengenai kemampuannya bertahan ketika menghadapi hambatan dalam mencapai tujuannya. Orang yang memiliki harapan tinggi menggunakan *self-talk* seperti “Saya dapat

melakukan ini” dan “Saya tidak akan berhenti sampai disini”. *Agentic thinking* penting dalam semua pemikiran yang berorientasi pada tujuan, namun akan lebih berguna pada saat individu menghadapi hambatan. Ketika individu menghadapi hambatan, *agency* membantu individu menerapkan motivasi pada jalur alternatif terbaik.

2.1.3 Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik, dimana pemerintah sebagai *principal*, sedangkan manajemen/eksekutif bertindak sebagai agen. Masalah konflik agensi dalam korporasi biasanya terjadi karena *principal* tidak dapat berperan aktif dalam manajemen perusahaan. Mereka mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada para agen untuk bekerja atas nama dan untuk kepentingannya. Delegasi otoritas ini menyebabkan para eksekutif memiliki insentif untuk membuat keputusan-keputusan strategis, taktikal dan operasional yang dapat menguntungkan mereka sendiri. Akibatnya, muncullah konflik agensi yang sulit diselaraskan teori agensi.

Jensen dan Meckling (2005) menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana ada satu atau lebih orang (yaitu *principal* atau pemegang saham atau pemilik) melibatkan atau menunjuk orang lain (yaitu *agen* atau manajemen) untuk bertindak atas nama pemilik. Tindakan tersebut meliputi pendelegasian beberapa wewenang dari pemilik untuk pengambilan keputusan. Para pemilik perusahaan berharap bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Manajemen diharapkan mampu menggunakan sumber daya

yang dipercayakan oleh pemilik seoptimal mungkin. Dengan demikian, para pemilik berharap manajemen dapat menyejahterakan mereka baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Dalam teori keagenan, dijelaskan hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajer, pemerintah sebagai pemegang saham pengendali seharusnya bisa mengawasi atau mengontrol kinerja dari manajer, tetapi seringkali pemerintah justru mempunyai tujuan lain selain meningkatkan kinerja. Selain itu, pengaruh negatif koneksi politik dalam persektif teori keagenan, bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah dengan manajemen atau dewan komisaris yang terhubung politik tidak hanya mengurangi nilai berbasis sumber daya, tetapi juga dapat mengakibatkan hubungan negatif dengan kinerja perusahaan. Hal ini berlaku baik di kalangan BUMN pusat dan lokal, karena mereka akhirnya dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah, yang memiliki kekuatan dan insentif untuk campur tangan dalam operasi perusahaan untuk mencapai tujuan sosial dan politik. Menurut Jin, dkk (2005) Di BUMN lokal, beberapa insentif dengan adanya koneksi politik adalah desentralisasi, masalah karir dan prospek promosi. BUMN pusat dengan manajemen dan dewan komisaris terhubung politik dalam memiliki perusahaan lebih untuk menjamin keselamatan ekonomi nasional salah satunya untuk mengurangi pengangguran. Marciano (2008) menyatakan bahwa perusahaan pemerintah yang dikendalikan oleh para birokrat memiliki tujuan yang didasarkan pada kepentingan politis dan bukan untuk menyejahterakan masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Shen dan Lin (2009) mengungkapkan bahwa pemerintah atau birokrat mempunyai kepentingan sosial dan politis daripada memikirkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini

akan berdampak pada berkurangnya kontrol dari pihak pemerintah terhadap pihak manajer sebagai pengelola perusahaan.

Koneksi politik manajer di perusahaan swasta umumnya memainkan peran berbeda dari rekan-rekan mereka di BUMN. Di perusahaan swasta tidak dikenakan beban kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan sulit bagi pemerintah untuk campur tangan dalam operasi mereka. Selain itu, manajer terhubung politik di perusahaan swasta tampaknya tidak akan khawatir tentang tujuan sosial dan politik pemerintah.

2.1.4 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nuraeni (2010) menyatakan bahwa kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, kinerja merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan dan dari segi analisis perubahan harga saham. Nuraeni (2010) juga menjelaskan bahwa tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membedakan hasil dan tindakan yang diinginkan.

Ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap penilaian kinerja suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain pemilik (investor), manajer, pemberi pinjaman dan kreditor, karyawan, organisasi pekerja, agen pemerintah dan

masyarakat umum (publik). Dalam menilai hasil dan kinerja suatu perusahaan, pihak-pihak tersebut memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan tujuan mereka. Pihak pertama yang berkepentingan terhadap penilaian kinerja perusahaan adalah manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas efisiensi operasi, profitabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber daya yang dikelola. Pihak selanjutnya yang berkepentingan terhadap penilaian kinerja perusahaan adalah pemilik perusahaan.

Pemilik perusahaan secara khusus berkepentingan atas profitabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang dari modal yang telah ditanamkan. Pemilik mengharapkan laba perusahaan dan dividen yang dibagikan meningkat. Selanjutnya ialah para pemberi pinjaman atau kreditor yang memberikan dana bagi perusahaan untuk berbagai jangka waktu. Mereka berkepentingan pada kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman yang jatuh tempo serta kemampuan untuk membayar kembali pokok pinjaman. Karyawan berkepentingan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar upah. Pemerintah berkepentingan dalam hal kemampuan perusahaan membayar pajak. Masyarakat umum (publik) berkepentingan dalam hal kemampuan perusahaan untuk memenuhi berbagai kewajiban sosial dan lingkungan. Dari berbagai kepentingan tersebut, secara garis besar kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan rasio-rasio berikut:

1. Rasio Likuiditas, terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek kepada pemberi pinjaman atau kreditor.

2. Rasio Aktivitas, terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin yang kemudian dibandingkan dengan industri sejenis sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.
3. Rasio Profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terkait penjualan, asset, ataupun laba atas modal sendiri. Ada beberapa macam rasio profitabilitas, antara lain *gross profit margin (GPM)*, *net profit margin (NPM)*, *return on asset (ROA)*, *return on equity (ROE)*, dan *operating ratio*.
4. Rasio Solvabilitas/Leverage, merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Nuraeni (2010) berpendapat bahwa *financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti bahwa perusahaan tersebut 100% menggunakan modal sendiri.
5. Rasio Pasar, memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya di masa depan. Rasio pasar tercermin dari harga saham perusahaan. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan antara lain *price earning ratio (PER)*, *market to book ratio*, Tobin's Q, dan *price/cash flow ratio*.

Masing-masing rasio di atas memiliki karakteristik yang berbeda dan masing-masing rasio tersebut memberikan informasi yang berbeda pula bagi manajemen serta investor.

Alat untuk mengukur kinerja dalam penelitian ini selain menggunakan *return on asset* (ROA). Hal ini dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian keuntungan yang dapat diperoleh investor atas investasinya. Selain itu dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dapat mengubah pendapatan dari pengembalian investasinya menjadi aset.

2.1.5 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan pihak yang memiliki saham terbesar dalam perusahaan. Kepemilikan perusahaan dapat berupa kepemilikan oleh individu, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja perusahaan yang buruk berakibat pada kesulitan perusahaan untuk mencapai tujuan. Misalkan saja kinerja perusahaan yang buruk mengakibatkan kondisi *financial distress*. Ketika perusahaan berada pada kondisi *financial distress*, tujuan perusahaan sulit dicapai. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan kebangkrutan pada perusahaan. Dengan demikian, struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang nantinya dapat berdampak pada risiko perusahaan untuk mengalami kebangkrutan.

Struktur kepemilikan merupakan komposisi modal antara hutang dan ekuitas termasuk juga proporsi antara kepemilikan saham *inside shareholders* dan *outside shareholders*. Ada beberapa karakteristik kepemilikan perusahaan, antara lain kepemilikan menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang menyebar membuat pengendalian dari pemilik cenderung lemah karena lemahnya pengawasan. Hal ini terutama bagi para pemegang saham minoritas. Mereka kurang tertarik untuk melakukan pengawasan karena akan menanggung biaya pengawasan atau manfaat yang akan diterima lebih kecil. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memberikan insentif bagi para pemegang saham untuk melakukan pengawasan pada tindakan manajer agar sesuai dengan kepentingan pemilik. Ini merupakan salah satu keuntungan dari kepemilikan yang terkonsentrasi. Namun demikian, kepemilikan yang terkonsentrasi dapat juga menimbulkan kerugian bagi nilai perusahaan karena suara pemegang saham minoritas kalah dalam pengambilan keputusan strategis meskipun terkadang keputusan tersebut lebih tepat. Kepemilikan yang terkonsentrasi juga menimbulkan kerugian lain yaitu pemegang saham dominan menanggung risiko bisnis dan biaya pengawasan sendiri.

Pada umumnya, struktur kepemilikan saham perusahaan di dalam laporan keuangan berupa kepemilikan manajerial, institusional, serta publik. Hasil penelitian Wulandari (2012) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan baik kepemilikan institusional maupun kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,279 dan nilai probabilitas kepemilikan publik sebesar 0,112. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan yang diuji adalah kepemilikan saham institusional serta kepemilikan saham oleh publik.

2.1.5.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, serta institusi lainnya pada akhir tahun. Beiner dkk, (2003) berpendapat bahwa kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Rahmayani (2010) menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik agensi adalah dengan mengaktifkan *monitoring* melalui investor-investor institusional. Hal ini sejalan dengan hasil Jama'an (2008) yang menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Menurut Pratiwi (2010) investor institusional mampu memberikan derajat monitoring yang lebih tinggi terhadap perilaku manajerial dibandingkan investor perorangan. Monitoring ini dilakukan secara eksplisit melalui aktivitas *corporate governance* dengan pengumpulan informasi dan menentukan harga atas dampak keputusan manajerial secara tepat. Hasil penelitian Sabrinna (2010) menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka dorongan untuk mengawasi tindakan manajemen semakin besar sehingga manajemen berupaya untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

2.1.5.2 Kepemilikan Publik

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan, diperlukan pendanaan yang besar. Pendanaan tersebut berasal tidak hanya dari internal tetapi juga dari eksternal perusahaan. Sumber pendanaan yang berasal dari eksternal diperoleh salah satunya dengan cara menjual sahamnya kepada

masyarakat (publik) melalui pasar modal (bursa efek). Hananto (2009) menyatakan bahwa salah satu ciri perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek atau pasar modal adalah perusahaan tersebut sudah melakukan proses *Initial Public Offering* (IPO) yaitu menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat umum agar masyarakat juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam perusahaan tersebut dalam bentuk investasi atau penanaman modal. Dengan demikian, semakin besar saham suatu perusahaan yang dijual kepada masyarakat membuat perusahaan tersebut terdorong untuk menyampaikan atau mengungkapkan informasi mengenai perusahaan secara lebih luas. Selain itu perusahaan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan diharapkan mampu meningkatkan sumber pendanaan bagi perusahaan tersebut yang berasal dari luar.

Hasil penelitian Djumahir (2011) menemukan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN, dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional. Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN yang *go public* di Indonesia dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional berupa peningkatan profitabilitas yang ditunjukkan oleh imbal hasil penjualan. Namun demikian, Nuraeni (2010) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya presentase kepemilikan saham oleh publik membuat pemilik publik kurang ketat dalam melakukan pengawasan manajemen dalam mengelola perusahaan.

2.1.6 Political Connection

Negara Indonesia dan Presiden Soeharto telah menjadi populer dalam pengembangan awal literatur *political connection*. Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Political connection bagaikan pedang bermata dua. Hal tersebut dapat meningkatkan atau justru membahayakan nilai perusahaan. Menurut teori berbasis sumber daya, nilai koneksi politik terutama didorong oleh hubungan dengan pemerintah yang membantu perusahaan untuk mendapatkan sumber daya kunci yang dapat meningkatkan nilai mereka. Li, dkk (2008) menyebutkan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih menguntungkan daripada memiliki eksekutif yang terhubung secara politik. Hal ini disebabkan adanya hubungan langsung dengan pemerintah menyebabkan perusahaan tersebut menerima manfaat langsung. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah juga memperoleh banyak manfaat akibatnya adanya hubungan politik. Perusahaan yang terkoneksi politik akan mendapat kemudahan memperoleh pinjaman dari bank, akses yang lebih mudah untuk mendapatkan modal dari pemerintah, preferensi peraturan yang menguntungkan bagi perusahaan. Ding, dkk (2014) menemukan bahwa pengaruh politik dari aspek kepemilikan pemerintah meningkatkan kinerja akuntansi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dikendalikan pemerintah menikmati keuntungan tertentu dari pemerintah yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Fan, dkk (2004) melaporkan hasil penelitian bahwa perusahaan yang memiliki CEO berkoneksi politik memiliki kinerja lebih rendah sekitar 37% dibandingkan dengan

perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik apabila diukur dengan *stock return* perusahaan mereka tiga tahun pasca IPO. Selain itu ukuran kinerja (seperti *market tobook value* dan *return on asset*) bagi perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh negara berhubungan negatif dengan tingkat kepemilikan negara.

Hasil penelitian Faccio (2006) menunjukkan bahwa perusahaan yang berkoneksi politik memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik pada basis akuntansi. Hal ini dimungkinkan karena ketika politisi menyalurkan sumber daya ke perusahaan yang dituju, dapat menimbulkan *distorsi insentif*, dan misalokasi investasi serta meningkatkan korupsi. *Political connection* bisa meningkatkan nilai perusahaan jika hal tersebut berhasil mencabut rente ekonomi yang tidak adil dengan mengorbankan pesaing dan konsumen. Namun demikian, apabila semua atau sebagian besar dari nilai perusahaan dikonsumsi oleh para politisi dan manajer yang terhubung dengan para politisi tersebut maka para pemegang saham hanya akan mendapatkan sedikit dari sisa nilai yang tersedia. Hal tersebut adalah salah satu masalah keagenan yang dapat dibantu dengan penggunaan struktur tata kelola yang tepat. Faccio (2006) menyatakan bahwa apabila *political connection* sebagai penentu utama keputusan investasi yang terdistorsi, akan mengakibatkan nilai perusahaan yang lebih rendah jika tanpa ada *political connection*. Bukti lain Jhonson, dkk (2006) memberikan dukungan lebih lanjut bahwa perbedaan dalam perilaku pinjaman dari bank BUMN dipengaruhi oleh hasil pemilihan partai yang berafiliasi dengan bank. Tindakan tersebut merupakan transfer kekayaan dari warga negara atau konsumen untuk perusahaan, yang menyebabkan peningkatan nilai perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan sebelumnya. Begitu juga dengan penelitian mengenai pengaruh *political connection* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini berusaha untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara struktur kepemilikan dan *political connection* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Bayu Wirawan dan Vera Diyanty (2014), meneliti mengenai dampak dari kepemilikan keluarga, *family aligned board* dan hubungan politik terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga memilih *a board* berdasarkan pada hubungan keluarga untuk melindungi niat mereka dan memutuskan kebijakan memaksimalkan kekayaan mereka. Hal ini akan mempengaruhi implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan tahun 2012. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap *family aligned board* dan memiliki hubungan negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Selanjutnya, hubungan politik tidak memiliki pengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan.
2. Tri Wulandari (2012), meneliti tentang analisis pengaruh *political connection* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *political connection* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang

dilakukan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009, 2010, dan 2011. Jumlah perusahaan sampel adalah 57 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *political connection* memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,047 dengan arah koefisien regresi bertanda negatif. Struktur kepemilikan baik kepemilikan institusional maupun kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,279 dan nilai probabilitas kepemilikan publik sebesar 0,112.

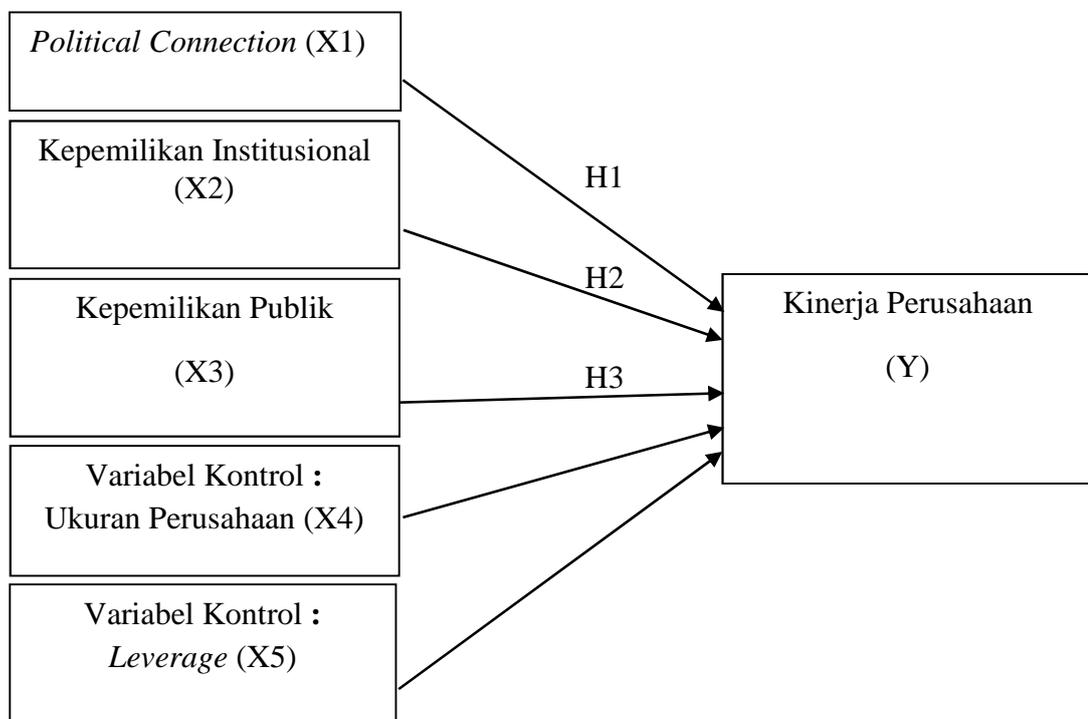
3. Goldman, dkk (2006) meneliti apakah Dewan yang berkoneksi politik mempengaruhi nilai perusahaan atau tidak. Mereka berpendapat bahwa di negara-negara dengan sistem hukum yang lemah dan tingkat korupsi yang tinggi menunjukkan bahwa koneksi politik berharga bagi perusahaan. Mereka meneliti apakah koneksi politik juga penting di AS yang memiliki pasar keuangan yang berkembang baik serta sistem hukum yang kuat. Mereka menggunakan data orisinil yang dikumpulkan langsung dari para anggota dewan perusahaan S&P500 yang berkoneksi politik. Data tersebut kemudian dipilah menjadi perusahaan yang berkoneksi dengan Partai Republik dan perusahaan yang berkoneksi dengan Partai Demokrat. Analisis respon harga saham terhadap pengumuman nominasi dewan di mana seorang direktur berkoneksi politik menunjukkan return saham abnormal positif. Penelitian mereka menganalisis respon harga saham terhadap kemenangan Partai Republik pada pemilihan Presiden tahun 2000

dan menemukan bahwa perusahaan yang terhubung dengan Partai Republik mengalami peningkatan nilai saham sedangkan perusahaan yang terhubung dengan Partai Demokrat mengalami penurunan nilai saham.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh politik dari aspek kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dan variabel independen yaitu pengaruh koneksi politik dan aspek kepemilikan. Variabel kontrol merupakan pendukung variabel independen dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten antara pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali hipotesis pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan dilihat dari kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.

Ada beberapa dewan komisaris dan dewan direksi bahkan pemegang saham dalam suatu perusahaan yang memiliki profesi lain selain di perusahaan tersebut. Keberagaman latar belakang dewan komisaris, dewan direksi serta pemegang saham diduga turut mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah adanya pengaruh negatif *political connection* dari dewan komisaris, dewan direksi serta pemegang saham perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

2.4.1 Pengaruh *Political Connection* terhadap Kinerja Perusahaan

Political connection dapat dipandang sebagai sebuah situasi di mana setidaknya satu orang dari *top officer* sebuah perusahaan, pemegang saham besar perusahaan adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus yang menonjol. Perusahaan yang terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa keuntungan diantaranya yaitu akses mudah untuk pembiayaan pinjaman bank, kekuatan pasar, dan menerima kontrak pemerintah.

Beberapa perusahaan yang terkoneksi politis dapat dengan mudah memperoleh pendanaan utang dengan mendapatkan “memo pinjaman” dari politisi. Ketika suatu perusahaan yang terkoneksi politis mengalami kesulitan keuangan, keberadaan *political connection* memberikan manfaat. Perusahaan tersebut mendapatkan akses mudah untuk peminjaman bank. Selain itu, perusahaan yang tertekan secara ekonomi dan mempunyai koneksi politik lebih mungkin untuk ditalangi oleh pemerintah dari pada perusahaan lain yang tertekan juga secara ekonomi tapi tidak memiliki koneksi politik. Namun demikian, perlu diingat bahwa kemudahan memperoleh pinjaman meningkatkan tingkat hutang suatu perusahaan sehingga perusahaan semakin terbebani. Soebiantoro (2007) menjelaskan bahwa jumlah hutang yang semakin meningkat dapat menyebabkan *financial distress*. Terjadinya *financial distress* menyebabkan penurunan nilai perusahaan sehingga mengurangi kemakmuran pemilik.

Salah satu contoh perusahaan terkoneksi politik yang dinyatakan pailit oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah perusahaan PT. Bali Turtle Island Development, PT. Bali Turtle Island Development merupakan perusahaan milik Bambang Trihatmojo (Putra Mantan Presiden Soeharto) dan pengurus Bali Turtle di gawangi oleh sejumlah pejabat dan pengusaha kawakan, pengurus Bali Turtle ini tidak lain terdiri dari mantan Kapolri, mantan BIN kemudian ada nama Rosano Barack, Boyke Gozali, dan Potjo Sutowo. Terjadinya pailit karena PT. Bali Turtle Island Development tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo. PT. Bali Turtle Island Development berhutang pada Penta Ocean Construction, Co., Ltd atas pekerjaan pengerukan dan reklamasi zona 11 di Pulau Serangan, Bali dengan perjanjian pada tanggal 9 Februari 2000. Total

hutang yang harus dibayar PT. Bali Turtle Island Development yaitu sebesar US \$ 16,15 juta dan Rp 796,69 juta di tambah denda keterlambatan pembayaran sebesar 6% per tahun sebanyak US \$ 11,63 juta dan Rp 573,62 juta. Dalam jangka waktu pembayaran hutang selama dua belas tahun, hutang tersebut tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo (*Kontan.co.id 2012*). Dari uraian di tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil adalah :

H1 : *Political connection* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan

2.4.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan

Pemahaman mengenai struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu hal penting terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Jensen dan Meckling (2005) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan dua mekanisme *corporate governance* yang utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Winanda (2009) menyatakan investor institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau di atas 5%. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor atau mengawasi perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi *agency cost*. Dengan adanya kontrol eksternal yang kuat maka manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan. Faisal (2005) menemukan adanya hubungan yang berlawanan antara kinerja saham dengan kepemilikan saham institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan

demikian, proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Pratiwi (2010) menjelaskan bahwa sesuai teori agensi, kinerja perusahaan yang lebih baik dapat dicapai dengan adanya praktek *Good Corporate Governance* yang memberikan pengawasan dan perlindungan yang lebih baik kepada para pemegang saham. Dengan demikian, dengan adanya kepemilikan institusional, kinerja perusahaan seharusnya menjadi lebih baik. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

Ketika kepemilikan saham oleh manajerial dan institusional tidak mampu lagi menjadi monitor bagi tindakan manajemen maka perusahaan perlu membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat (publik) untuk ikut serta dalam penyertaan saham. Penyertaan saham oleh masyarakat atau publik merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ialah dengan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Keterlibatan masyarakat dalam struktur kepemilikan saham mendorong manajemen perusahaan untuk dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan..

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan sebelumnya. Setiawan (2006) menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan yang dilihat dari proporsi kepemilikan publik dan kepemilikan

asing, keduanya mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan dengan kinerja perusahaan.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Purba (2004), meneliti pengaruh proporsi saham publik terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan saham publik dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Hal tersebut memberikan sinyal yang baik bagi masa depan pasar modal di Indonesia sebab jika presentase saham publik di perusahaan yang *go public* dapat ditingkatkan, maka kinerja perusahaan di Indonesia yang *go public* semakin baik. Lebih lanjut, Purba (2004) menyatakan esensi dari pengujian yang dilakukan menekankan bahwa kinerja perusahaan semakin baik apabila proporsi saham milik publik dapat ditingkatkan. Kebijakan perusahaan untuk meningkatkan proporsi kepemilikan saham publik dapat memberikan dampak pada peningkatan kinerja perusahaan sebab bertambahnya proporsi saham milik publik mendorong manajemen mengelola perusahaan dengan baik. Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H3 : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis. Variabel tersebut terbagi menjadi dua yaitu variabel independen dan atau variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini ialah *political connection* serta struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan publik. Variabel dependen dalam penelitian ialah kinerja perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang dinilai dengan total aset serta *leverage*.

3.1.1 Political Connection

Perusahaan didefinisikan memiliki *political connection* apabila salah satu dari pemilik perusahaan, dewan direksi atau dewan komisaris pernah menjabat atau sedang menjadi pejabat pemerintah, pejabat militer, atau anggota parlemen selama periode penelitian. Kriteria perusahaan yang memiliki *political connection* dalam penelitian ini mengikuti kriteria yang digunakan Chaney, dkk (2011), yakni perusahaan dinyatakan memiliki hubungan politik paling tidak salah satu pemegang saham besarnya baik secara individu maupun institusional, Dewan Direksi baik ketua maupun anggota dan Dewan Komisaris baik ketua maupun anggota, merupakan anggota DPR, menteri dan wakil menteri, pejabat militer atau kepala daerah (Gubernur atau Bupati). Hal ini dipertimbangkan karena dalam hal

pelaksanaan bisnis dengan anggota DPR dan kementerian dinilai dapat mendatangkan keuntungan tersendiri dalam hal kekuasaan pengusaha menyampaikan kepentingannya dalam hal tender pemerintah, peraturan maupun kebijakan yang menyangkut usaha. Sedangkan hubungannya dengan kepala daerah, dipertimbangkan kemungkinan pengusaha menjalankan usahanya yang harus dengan persetujuan khusus menyangkut izin usaha, yang biasa diatur oleh pemerintah daerah. Hubungannya dengan pejabat atau mantan pejabat militer, dapat memberi keamanan bisnis bagi pengusaha. Dan hubungannya dengan petinggi partai, karena baik DPR maupun DPRD merupakan tempat-tempat strategis yang dipimpin oleh orang-orang dari partai pemenang pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah.

Chaney, dkk (2011) menyatakan bahwa hubungan dengan anggota pemerintahan termasuk jika politisi ini sendiri merupakan pemegang saham besar atau dewan direksi dan dewan komisaris di perusahaan, ataupun jika kerabat dekat (seperti anak) politisi memegang berada dalam posisi sebagai pemegang saham terbesar dan top direksi di perusahaan. Hubungan dengan anggota DPR dinyatakan memiliki hubungan jika anggota DPR itu sendiri merupakan pemegang saham terbesar ataupun dewan direksi dan dewan komisaris di perusahaan dan tidak termasuk jika posisi tersebut dipegang oleh kerabatnya. Susunan kabinet pemerintahan Republik Indonesia diperoleh dari Wikipedia,

file:///D:/Daftar%20Menteri/Daftar_kabinet_Indonesia.htm,

data nama-nama anggota pemerintahan, didapatkan dari website indonesia.go.id dan depdagri.go.id, daftar anggota DPR didapatkan dari website www.dpr.go.id, daftar susunan anggota partai politik dan tim sukses partai politik dari website

www.kpu.go.id. Selain kriteria tersebut dimasukkan kriteria kedekatan atau kekerabatan dengan mantan-mantan presiden Indonesia. Leuz and Oberholzer-Gee (2006) menjelaskan bahwa seperti kedekatan pemilik perusahaan baik dari segi kepemilikan saham maupun manajerial terhadap rezim Soeharto. Hal ini dipertimbangkan oleh efek *entrenchment* yang mungkin masih melekat dari rezim kepemimpinan mantan presiden Soeharto, yang juga diketahui banyak memiliki usaha di segala bidang. *Political connection* diukur sebagai variabel dummy, yaitu:

- a. 1 jika perusahaan memiliki hubungan politik;
- b. 0 jika tidak ada hubungan politik.

3.1.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan porsi saham beredar perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau badan. Insitusi yang dimaksud dalam hal ini diantaranya yaitu badan usaha lain baik dalam negeri maupun luar negeri, lembaga keuangan, yayasan, serta pemerintah. Jama'an (2008) berpendapat bahwa kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi kesempatan bagi institusi untuk mengawasi tindakan manajemen. Dengan demikian manajemen akan bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan dan berupaya meningkatkan kinerja perusahaan. Dari uraian di atas maka dalam penelitian ini besarnya kepemilikan institusional dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kepem. Institusional (INST)} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah total saham biasa}} \times 100\%$$

3.1.3 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan besarnya porsi saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat atau publik. Masing-masing kepemilikan saham oleh publik kurang dari 5%. Besarnya kepemilikan saham oleh publik dihitung sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Publik (PUB)} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki publik}}{\text{Jumlah total saham biasa}} \times 100\%$$

3.1.4 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sabrinna (2010) mendefinisikan kinerja perusahaan sebagai kemampuan perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan rasio Return on Assets (ROA). Rasio ROA dipilih untuk mengukur kinerja perusahaan karena rasio ini mudah dihitung dan dipahami. Berdasarkan penelitian Chantrataragul (2007) Return on Assets (ROA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earnings Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Total of Assets}} \times 100\%$$

1.1.5 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diamati di dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan skala besar dan skala kecil. Agar hasil penelitian tidak bias maka variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan *leverage*.

Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada total aset perusahaan yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan diukur dengan transformasi logaritma natural dari total aset.

$$Size = \text{LogAset}$$

1.1.5.1 Leverage

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dengan tujuan penggunaan aset atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para *stakeholder* perusahaan. *Leverage* juga didefinisikan sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva. Ketika perusahaan mengalami kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan akan mencari pinjaman dari luar perusahaan. Dengan dana yang cukup, maka manajer termotivasi untuk bisa memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui laba yang didapatkan di masa depan *leverage* diukur dengan membagi total aset dengan total kewajiban.

Menurut Clarke, dkk (2013), *leverage* merupakan rasio hutang terhadap total ekuitas menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasi perusahaan. Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini

digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya.

Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka perusahaan akan cenderung melaporkan profitabilitas yang tinggi dan semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba yang tinggi pula. Namun, investor juga perlu mempertimbangkan risiko yang harus ditanggung saat berinvestasi ke dalam perusahaan yang nilai *leverage* tinggi. Semakin tinggi *leverage*, maka risiko keuangan yang harus ditanggung akan semakin tinggi pula.

$$\text{Leverage} = \text{Total Kewajiban} \div \text{Total Aset}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015. Sampel penelitian ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi *political connection* terhadap susunan pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan serta melakukan penelusuran persentase saham yang dimiliki pada pemegang saham, susunan dewan komisaris dan dewan direksi dengan susunan anggota kader partai politik di Indonesia, Kabinet Pemerintahan Indonesia serta susunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari hasil identifikasi tersebut, maka sampel penelitian adalah perusahaan yang memiliki *political connection* ditambah dengan perusahaan yang tidak memiliki *political connection*.

Kriteria pengambilan sampel antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan telah listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015;
2. Perusahaan merupakan perusahaan non-keuangan dan BUMN;
3. Perusahaan mempunyai data mengenai EBIT, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan, Total Aset, dan Leverage;
4. Nilai ROA tidak boleh negatif.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014–2015 diperoleh dari www.idx.co.id. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai struktur kepemilikan perusahaan yang berupa kepemilikan institusional dan publik, data mengenai laba perusahaan sebelum bunga dan pajak (EBIT) serta susunan dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Susunan kabinet pemerintahan Republik Indonesia diperoleh dari website www.dpr.go.id, daftar anggota kader partai politik dan relawan Jokowi-JK yang menjadi komisaris di BUMN di dapat dari www.bisniskeuangan.kompas.com.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut (Sugiyono,2004). Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum,

maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji *t* dan *F* mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil. Dalam penelitian ini, yang digunakan untuk uji normalitas adalah analisis grafik dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Analisis grafik yaitu dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan ialah

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Ghozali (2013) menyatakan bahwa mendeteksi normalitas dengan uji *Kolmogorov–Smirnov* dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi. Apabila nilai probabilitas signifikansi jauh di atas tingkat signifikansi maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal atau memenuhi asumsi klasik.

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbedadisebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas ialah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar analisis yang digunakan ialah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik–titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas;
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain menggunakan grafik plot, heteroskedastisitas dapat dideteksi menggunakan uji park. Uji park dilakukan dengan membuat persamaan regresi di mana dalam persamaan regresi tersebut variabel dependennya adalah logaritma natural dari nilai residual hasil regresi variabel–variabel penelitian. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi uji park signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model yang diuji tidak dapat ditolak.

3.4.2.3 Uji Multikolinieritas

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model analisis regresi dapat dilihat dari :

1. Nilai *tolerance* dan lawannya;
2. *Variance Inflation Factor* (VIF).

Apabila dalam suatu analisis regresi nilai *tolerance* = 0,1 maka tingkat kolonieritas = 0,95. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai *tolerance* di atas 0,1.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin–Watson (DW Test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dilihat dari nilai Durbin–Watson. Berikut ini merupakan dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, yaitu :

Table 3.1

Kriteria Autokorelasi *Durbin–Watson* (DW)

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, Positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali I, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model regresi linier berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e \dots\dots\dots i$$

$$Y = a + b_1(\text{POL}) + b_2(\text{INST}) + b_3(\text{PUB}) + b_4(\text{SIZE}) + b_5(\text{LEV}) + e \dots\dots\dots ii$$

Keterangan:

Y = ROA sebagai pengukur kinerja perusahaan

a = Konstanta

b1 = Koefisien Regresi Dari Hubungan Politik (POL)

b2 = Koefisien Regresi Dari Kepemilikan Institusional (INST)

b3 = Koefisien Regresi Dari Kepemilikan Publik (PUB)

b4 = Koefisien Regresi Dari Ukuran Perusahaan (SIZE)

b5 = Koefisien Regresi Dari Leverage (LEV)

X1 = *Political Connection* (POL)

X2 = Kepemilikan Institusional (INST)

X3 = Kepemilikan Publik (PUB)

X4 = Ukuran Perusahaan (SIZE)

X5 = *Leverage* (LEV)

e = Kesalahan/Gangguan

1.4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Ghozali (2009) menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. Alasannya bila suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Dalam kenyataan nilai adjusted R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis yaitu :

1. Jika nilai $R^2 = 1$, maka Adjusted $R^2 = R^2 + 1$;
2. Jika nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1 - k)/(n - k)$;
3. Jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negatif.

3.4.3.3 Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = b_6 = b_7 = 0$, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen secara bersama-sama;
2. $H_0 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq b_6 \neq b_7 \neq 0$, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen secara bersama-sama. Penentuan besarnya F menggunakan rumus :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinan

n = Jumlah observasi

k = jumlah variabel

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- a. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen;
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$. Artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel-variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel pengaruh koneksi politik, variabel kepemilikan institusional dan variabel kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran *political connection* diukur dengan mengidentifikasi persentase kepemilikan saham pemerintah dan melihat dewan komisaris maupun dewan direksi yang dihuni oleh birokrat pemerintah atau mantan birokrat pemerintah pada perusahaan. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah variabel kontrol yakni ukuran perusahaan dan *leverage*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 : *Political connection* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, didukung. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki nilai ROA yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini ditunjukkan dari nilai ROA tertinggi pada perusahaan *Modernland Realty Tbk* yang merupakan perusahaan tanpa koneksi politik. Adapun pemberian bantuan dana kepada partai politik dari pengusaha yang menimbulkan ikatan timbal balik atas bantuan tersebut, Sebagai imbalan atas bantuan tersebut, partai politik melalui anggotanya yang berada di jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Kementerian merumuskan kebijakan atau peraturan yang dapat memudahkan bisnis dari perusahaan yang telah berkontribusi pada pendanaan partai.

2. Hipotesis 2 : Kepemilikan institusional pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, tidak didukung. Hal ini karena perusahaan baik swasta maupun BUMN terdapat kepemilikan institusional yang di pegang dan dikelola pemerintah, yang lebih cenderung memiliki dewan yang dihuni oleh birokrat pemerintah atau mantan birokrat pemerintahan, dan cenderung akan memprioritaskan keselarasan tujuan perusahaan dengan tujuan pemerintah daripada memaksimalkan nilai perusahaan, selain itu tidak dapat memaksimalkan fungsi pengawasan secara baik, sehingga mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan.
3. Hipotesis 3 : Kepemilikan publik yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, tidak didukung. Hal ini karena tingkat batas rata-rata kepemilikan saham oleh publik yang cenderung lebih kecil dari kepemilikan institusional, menyebabkan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh positif dan juga tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, hal ini terlihat dari besarnya kendali oleh pemegang saham mayoritas yang membuat pemegang saham publik tidak dapat banyak mengambil kebijakan dalam perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Rendahnya nilai *Adjusted R2* terhadap ROA sebesar 19,3%, hal ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar.
2. Penelitian ini hanya diukur dengan rasio ROA, dimana rasio ROA berfokus pada tujuan jangka pendek bukan jangka panjang.

3. Penelitian ini hanya mengidentifikasi *political connection* dari persentase kepemilikan saham pemerintah dan hanya melihat susunan dewan komisaris maupun dewan direksi yang dihuni oleh birokrat pemerintah atau mantan birokrat pemerintah tanpa melibatkan sampel perusahaan yang memiliki *political connection* dari hubungan tidak langsung seperti hubungan kerabat.
4. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan hanya dua tahun yaitu 2014-2015.

5.3 Saran

Atas keterbatasan dalam penelitian ini, maka untuk penelitian yang akan datang sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan proksi lain dalam mengukur kinerja perusahaan, misalnya menggunakan menggunakan rasio pasar untuk mengukur kinerja perusahaan, karena rasio pasar yang dimaksud dalam hal ini tercermin dari harga saham perusahaan. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan antara lain *Price Earning Ratio* (PER), *Market to book ratio*, Tobin Q dan *price/cash flow ratio*. Rasio tersebut dipandang lebih mengindikasikan bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan baik di periode sebelumnya maupun prospek di periode selanjutnya. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya periode pengamatan dapat ditambah lagi tidak hanya dua tahun agar analisis mengenai pengaruh *political connection* terhadap kinerja perusahaan dapat memberikan gambaran yang pasti mengenai pengaruh keberadaan *political connection* di suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang, James S. David K Ding dan Tiong yang Tgong. 2011. *“Political Connection and Firm Value.” Massey U Collage of Business Research Paper 21. Papers.ssrn.com*
- Annual Report Tahun 2014 dan 2015 diperoleh dari www.idx.co.id. Pada September 2016 Pukul 13.00
- Budiarjo, Miriam. 1977. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta.
- Daftar Perusahaan *Go Public* diperoleh dari www.sahamok.com. Pada September 2016 Pukul 11.00
- Daftar Mantan Penjabat dan Relawan Kampanye Jokowi-JK yang menjadi Komisaris BUMN diperoleh dari www.bisniskuangan.kompas.com. Pada Oktober 2016 Pukul 12.23
- Faccio, M. 2002. *“Politically-connected firms: Can they squeeze the state?” Notre Dame: University of Notre Dame*. h.1-56.
- Faccio, M. 2006. *“Politically Connected Firms.” American Economics Review*, Vol. 96, No. 1, h.369-386.
- Fan, J. P. H., T. J. Wong, dan Dong-Hua Chen. 2004. *“Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performance of China’S Partially Privatized Firms.”* www.afajof.org
- Fan, J. P. H., T. J. Wong, dan Tianyu Zhang. 2007. *“Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performance of China’S Newly Partially Privatized Firms.” Journal of Financial Econommics* 84. 330-357.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika. Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 21*. Cetakan VII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- Gabrillian, Abba. 2012. Kasus koneksi politik antara M. Nazaruddin dan Grup Permai
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/9>
pada Juni 2016 pukul 13.45 WIB
- Goldman, Eitan, Jorg Rocholl, dan Jongil So. 2006. "Do Politically Connected Boards Affect Firm Value?" *Review of Financial Studies* 22. p.2331-2360. Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD). 2009. *Good Corporate Governance* dalam perspektif manajemen strategi. Jakarta: IICG.
- Jensen, M. C dan W. H. Meckling. 2005. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4. h.305-360.
- Nur'Aeni, Dini. 2010. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal. FE UNDIP*.
- Purba, Jan Horas V. 2004. "Pengaruh Proporsi Saham Publik Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, Vol. 4, No. 2, h.109-116.
- Rahmayani, Diah. 2010. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Kinerja Intellectual Capital Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal. FE UNDIP*.
- Sabrina, Anindhita Ira. 2010. "Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal. FE UNDIP*.
- Sujoko dan Ugy Soebiantoro. 2007. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern, dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No. 1, h.41-48.
- Sumarni, Murti dan Jhon Soeprihanto. 1999. Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Susunan anggota DPR Republik Indonesia diperoleh dari www.dpr.go.id.
Pada September 2016 Pukul 10.45
- Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo W. 2001. Pengantar Bisnis Modern. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Vermonte, P. J. 2012. Mendanai Partai Politik: Problem dan Beberapa Alternatif Solusinya Analisis CSIS 31 (1) 82-94.

Wijantini. 2007. "A Test of The Relationship Between Political Connection And Indirect Cost of Financial Distress In Indonesia." *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, Vol. 3, No. 2, h.61-81.

Winarto, Yudho. 2012. Kasus Kepailitan Bali Turtle Island
<http://m.kontan.co.id/news/bali-turtle-bawa-sengketa-kepailitan>
pada Agustus 2016 pukul 19.34 WIB

Watts, R.L. dan J.L Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*.
Prentice Hall.

Yonneddy. 2009. "Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal*. FE UNDIP